

**GOOD GOVERNANCE TOURISM DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA
BENDUNGAN DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2020-2023**

Oleh: Dinda Amelia

Pembimbing : Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Desa Sungai Paku memiliki sebuah Objek Wisata Bendungan yang potensial untuk berkembang dan dikenal banyak orang, Akan tetapi pengelolaan Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku ini tidak terkelola dengan baik. Sehingga, *Good Governance Tourism* perlu di teliti untuk mengetahuinya. Dalam pengakuan yang didapat dari Ketua POKDARWIS Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku Bapak Rasyid, ia mengatakan bahwa Bendungan Desa Sungai Paku telah diresmikan sejak tahun 2018 sebagai tempat wisata, dan pada tahun 2020 yakni saat terjadinya pandemi *Covid-19* pengelolaan bendungan mulai terkendala dan berujung dengan penurunan jumlah pengunjung secara drastis.

Penelitian ini bermaksud untuk Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari *Good Governance Tourism* yang belum optimal dalam pengelolaan di Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Lokasi Penelitian di Objek Wisata Bendungan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance Tourism* yang dikemukakan oleh Sunaryo *Good Governance Tourism* atau suatu tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak Pemerintah, swasta/ *industry* pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif.

Hasil penelitian *Good Governance Tourism* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023 belum berjalan dengan baik, hal ini di karenakan dari 10 indikator hanya 3 yang dapat diterapkan. Hambatan yang paling besar terjadi dalam *Good Governance Tourism* Dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023 yaitu kurangnya koordinasi pemerintah desa dan dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

Kata Kunci: Good Governance Tourism – Objek Wisata –Desa Sungai Paku

ABSTRACT

Sungai Paku Village has a Dam Tourism Object that has the potential to develop and is known to many people, but the management of the Sungai Paku Dam Tourism Object is not well managed. So, Good Governance Tourism needs to be monitored to find out. In the acknowledgment received from the Chairman of POKDARWIS Natural Tourism Object Sungai Paku Village Dam Mr. Rasyid, he said that the Sungai Paku Village Dam has been inaugurated since 2018 as a tourist attraction, and in 2020 that is when the Covid-19 pandemic occurred, the management of the dam began to be hampered and ended with a drastic decrease in the number of visitors. In addition, the problem phenomenon in this research is that there is a conflict between the agencies that have the authority to build this dam, namely the Public Works and People's Housing Office of the Republic of Indonesia and the Tourism Office.

This research intends to find out how the implementation of Good Governance Tourism is not optimal in the management of Sungai Paku Village Dam Tourism Object, Kampar Kiri District, Kampar Regency. Location of Research in the Dam Tourist Object located in Sungai Paku Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. This research uses the theory of Good Governance Tourism proposed by Sunaryo Good Governance Tourism or a good governance of tourism is essentially the coordination and synchronization of programs between existing stakeholders as well as the involvement of synergistic active participation (integrated and mutually reinforcing) between the Government, private sector / tourism industry, and related local communities. The data analysis technique used is Qualitative data analysis is done when the empirical data obtained is qualitative data.

The results of the Good Governance Tourism Research in the Management of Tourism Objects Sungai Paku Dam Village Kampar Kiri Subdistrict, Kampar Regency Year 2020-2023 has not gone well, this is because out of 10 indicators only 3 can be implemented. The biggest obstacle that occurs in Good Governance Tourism in the management of Sungai Paku Dam Village Natural Tourism Object, Kampar Kiri District, Kampar Regency Year 2020-2023 is the lack of coordination between the village government and the tourism department in the development of tourist objects.

Keywords: *Good Governance Tourism - Tourist Object - Sungai Paku Village*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki destinasi wisata dengan potensi bernilai daya guna tinggi. Adapun salah satu lokasi potensi wisata yang akan penulis angkat dalam permasalahan ini ialah Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kabupaten Kampar ini merupakan salah satu gerbang pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Riau. Berbagai wisata alam di Kabupaten Kampar ini mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan

masyarakatnya. Letaknya yang strategis dan juga dekat dengan ibu kota provinsi yaitu kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar memiliki objek wisata dan daya tarik wisata bagi para wisatawan terutama masyarakat Riau baik wisata alam, buatan maupun wisata buatanya.

Salah satu wisata alam buatan yang masih dalam pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Kampar terutama yang satu-satunya berada di Kecamatan Kampar Kiri adalah Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku yang mana potensi pariwisatanya yang cukup menjanjikan dengan daya tarik bagi wisatawan lokal ataupun non lokal. Sungai

Paku adalah sebuah Desa di Kecamatan Kampar Kiri yang memiliki wisata alam bendungan. Luasnya sekitar 40 ribu hektar. Bendungan ini berada tepat di tengah-tengah Kelurahan Lipat Kain. Sejak awal dibangun dan difungsikan sebagai bendungan irigasi serta penunjang sarana ekonomi rakyat khususnya di bidang perikanan.

Bendungan ini dibangun oleh Pemerintah, pada tahun 1978 dan mulai difungsikan pada tahun 1980. Pada awal pembangunannya, bendungan direncanakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dan irigasi. Namun pada akhirnya, bendungan ini beralih fungsi menjadi kawasan budidaya perikanan dan tempat rekreasi. Pada bulan September 2017, para masyarakat setempat sadar dengan potensi pariwisata di tempat itu, kemudian Sungai Paku diresmikan sebagai objek wisata alam bendungan.

Pada Objek wisata alam ini, para wisatawan disajikan atraksi telusur bendungan, menggunakan *Speed Boat* yang telah disiapkan oleh kelompok sadar wisata bendungan (POKDARWIS).

Terdapat beberapa *Speed Boat* yang bisa digunakan yang memiliki kapasitas penumpang sebanyak 15 orang. *Speed Boat* ini membawa wisatawan menelusuri indahnya danau yang terbendung di desa itu. Pemandangan pulau-pulau kecil dan aktivitas budidaya Ikan Keramba jaring apung yang dimiliki masyarakat sekitar, menjadi panorama yang indah memanjakan mata tamu yang datang. Dengan berbagai pemandangan yang disajikan, tarif tiket masuk Objek Wisata Bendungan inipun tergolong relatif rendah. Tidak hanya ditujukan sebagai tempat wisata saja, namun Objek Wisata Alam Bendungan ini juga dijadikan sebagai tempat perhelatan berbagai acara seperti perlombaan 17 Agustus setiap tahunnya dan *Balimau Kasai* yang diadakan setiap menyambut Bulan Suci Ramadhan. Bendungan ini menjadi destinasi favorit bagi warga baik dari sekitar Desa Sungai Paku maupun dari luar desa untuk melakukan rutinitas adat Mandi *Balimau*.

Keberadaan Objek wisata ini tidak terlepas dari berbagai aktor berperan yang biasa disebut dengan *stake holders* atau pemangku kepentingan antara lain :

Tabel 1. Aktor yang Terlibat dalam Pengelolaan Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku

No.	Aktor Terlibat	Peran
1.	Pemerintah Desa	Pemerintah disini berperan sebagai Motivator sekaligus Fasilitator yang mana dalam pengembangan objek wisata ini memerlukan suatu bentuk dorongan atau masukan berupa pemahaman bagaimana langkah ataupun upaya merawat dan melestarikan potensi desa yang ada. Selain itu Pemerintah Desa juga berperan sebagai fasilitator yang mana sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan suatu pengembangan Objek Wisata ini dan sebagai sarana penghubung antara instansi terkait guna realisasi pengembangan objek wisata.
2.	Pihak Swasta	Pihak swasta disini perannya masih belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan objek wisata ini dikarenakan kerjasama yang terjalin masih bersifat umum dan masih berdiri masing-masing diluar kemitraan yang dilakukan.
3.	Masyarakat	POKDARWIS atau Kelompok Sadarwisata disini berperan sebagai perwakilan dari masyarakat yang turut mengelola objek wisata ini dan sebagai mobilisator yang mana dalam pengembangan objek wisata ini berperan aktif sebagai penggerak perangkat desa beserta masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan pengembangan pariwisata sesuai arahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, POKDARWIS ini juga berperan sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif, menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat yang akan diteruskan kepada pihak pemerintah desa dengan harapan agar dapat direalisasikan. POKDARWIS ini juga memiliki posisi sebagai pengarah pada acara-acara yang dikelola oleh PHBI (Panitia Hari Besar Islam) dan Para pemuda sekitar di Objek Wisata tersebut. POKDARWIS berperan sebagai pihak yang melakukan perawatan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas yang ada di Alam Bendungan secara sedikit demi sedikit.

Sumber : *Olahan Penulis, 2024*

Adapun komponen-komponen tersebut yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas. Komponen tersebut harus berkesinambungan sehingga objek wisata dapat memiliki daya saing yang tinggi (Dafa Rizky Prayoga et al., 2022).

1. Atraksi

Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini memiliki beberapa atraksi wisata yang dapat dikatakan

sebagai suatu objek wisata antara lain seperti Pemandangan yang disajikan disekitar bendungan, dan atraksi telusur bendungan menggunakan *Speed Boat* yang telah disiapkan oleh kelompok sadar wisata bendungan (POKDARWIS). Namun, untuk jumlah *Speed Boat* tergolong kurang jika ada pengunjung yang ingin melakukan telusur bendungan hal ini disebabkan karena terjadinya

musibah kebakaran yang mengakibatkan *Speed Boat* beserta peralatan keamanannya ikut terbakar. Sejak tahun 2020 Hingga saat ini masih belum ada perbaikan yang signifikan.

Tidak hanya atraksi telusur bendungan, terdapat juga beberapa *Spot Foto Instagramable*, yakni Rumah pohon dan *Spot* foto berbentuk *Love*. Untuk Rumah Pohon ini Lokasinya di tengah danau, tepat berada di batang kayu Merbau yang sudah mati. Kayu tersebut menjulang terbagi dua batang, tingginya sekitar 10 meter. Untuk *Spot* foto ini sendiripun kualitasnya juga masih tergolong kurang, dibutuhkan perawatan yang lebih untuk membuat para pengunjung lebih tertarik.

2. Amenitas

Amenitas adalah segala bentuk fasilitas pendukung yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya (Ramadhani et al., 2021). Pada Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini memiliki ketersediaan amenitas berupa:

a. Beberapa rumah makan ataupun warung kopi yang ada di sekitaran lingkungan bendungan, untuk jumlahnya masih terbilang sedikit, tidak bervariasi dan jarak antar rumah makan ataupun warung kopi cukup jauh, sehingga para pengunjung harus menghabiskan waktu lebih lama dengan berjalan kaki menuju rumah makan ataupun warung kopi.

b. Fasilitas Toilet yang ada di Objek Wisata Alam Bendungan ini masih berjumlah sedikit dan kurang memadai, beberapa toilet mengalami kerusakan sehingga jika jumlah pengunjung sedang tinggi para pengunjung perlu mencari masjid sekitar untuk sekedar menggunakan fasilitas toilet.

c. Mushola menjadi salah satu kendala dari amenitas yang harus di perhatikan. Tidak adanya mushola menjadi hal yang paling sering dikeluhkan oleh para pengunjung. Pengunjung harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencari masjid ataupun mushola.

d. Pembuangan Sampah dan penanganan sampah masih merupakan masalah utama yang selalu ada di tempat wisata umum, Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sampah. Kurangnya kesadaran pengunjung dan masyarakat akan kebersihan juga menjadi faktor penting penyebab banyaknya sampah di sekitaran area, terutama jika berlangsungnya berbagai *event*.

e. Gazebo di sekitar lingkungan bendungan ini hanya berjumlah 1 buah, sisanya hanyalah pondok para pemilik warung atau rumah makan di sana. Menyebabkan kurangnya tempat berlindung untuk para pengunjung yang datang.

f. Sekretariat POKDARWIS kondisinya untuk saat ini kurang memadai ini disebabkan karena terjadinya musibah kebakaran, sama halnya dengan Perahu dan *Speedboat* yang ikut terbakar, hingga saat ini belum ada perawatan dan perbaikan secara signifikan.

g. Penerangan sekitar bendungan juga masih terbilang sangat kurang, hal ini perlu adanya pengadaan beberapa tiang listrik untuk penerangan disepanjang tanggul bendungan.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai tujuan, yang menyangkut kenyamanan, keamanan, dan juga waktu tempuh. Semakin tingginya aksesibilitas maka akan semakin mudah pula untuk di jangkau serta semakin tinggi tingkat kenyamanan wisatawan maka semakin banyak pula orang yang berkunjung (Dafa Rizky Prayoga et al., 2022). Akses jalan menuju Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku cukup mudah, dikarenakan kondisi jalan menuju bendungan ini sudah bagus dibuktikan dengan jalan yang sudah beraspal. Namun, untuk jarak tempuh sampai tepat di lokasi bendungan cukup jauh yakni sekitar ±4km dari jalan lintas Lipat Kain. Untuk petunjuk jalan ataupun Gapura juga belum terfasilitasi yang menyebabkan

pengunjung kesulitan mencari arah untuk sampai ke lokasi bendungan.

Berdasarkan data-data dan permasalahan diatas, jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kampar, wisata Bendungan juga mempunyai potensi-potensi yang cukup menonjol, namun masih belum dikelola secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi juga masih sangat kurang, sehingga perlu adanya *monitoring* dari pihak pemangku kepentingan atau pemerintah. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan teratur menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah daerah sebagai tempat tujuan destinasi wisata guna untuk memperbaiki tatanan daerah guna memajukan pariwisata yang berkelanjutan ataupun sebagai penghasil ekonomi daerah dan masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Mengapa Penerapan *Good Governance Tourism* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023 belum terlaksana dengan baik ?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Good Governance Tourism* Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Bendungan Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten tahun 2020-2023.

D. Kerangka Teori

Teori *Good Governace Tourism*

Good Governance Tourism sebagai perpaduan antara *Good Governance* dan industri pariwisata. Menurut Sunaryo (2013: 77) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak Pemerintah, swasta/ industry pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. *Good governance* merupakan arah baru administrasi publik yang dalam dekade sekarang cenderung mengedepankan konsep tersebut dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan publik melalui berbagai keputusan publik dengan melibatkan lebih banyak petaruh diluar aktor pemerintah. Sehingga melalui penyelenggaraan *Good Governance* dapat dilihat tidak ada yang dominan untuk menentukan arah gerak aktor lain.

Prinsip-prinsip pada *Good Governance Tourism* Adapun beberapa prinsip yang mudah dikenali dalam penyelenggaraan yang berbasis *Good Governance Tourism* menurut Sunaryo (2013) prinsip-prinsip tersebut berupa:

Tabel 2. Prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* (Sunaryo, 2013: 78-81)

Prinsip-prinsip	Deskripsi
Partisipasi masyarakat terkait	Masyarakat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kemudian masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program-program yang sudah disusun sebelumnya.
Keterlibatan segenap pemangku terkait	Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Kemitraan kepemilikan lokal	Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas untuk masyarakat setempat.
Pemanfaatan sumber daya secara berlanjutan	Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang ada.
Mengakomodasikan aspirasi masyarakat	Aspirasi dan tujuan masyarakat harus diperhatikan guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengunjung/wisatawan dengan masyarakat sekitar.
Daya dukung lingkungan	Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, social-ekonomi dan budaya.
Monitor dan evaluasi program	Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjutan mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.
Akuntabilitas lingkungan	Perencanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan komponen-komponen lingkungan yang saling berkaitan baik.
Pelatihan pada masyarakat terkait	Pelatihan pada masyarakat diperlukan guna mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat.
Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan	Pembangunan kepariwisataan secara berlanjutan juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi Penelitian dari informan penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Sungai Paku,

Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

G. Informan Penelitian

Informan penelitian, adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penentuan

informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun Informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Informan penelitian *Good Governance Tourism* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bendungan Desa Sungai Paku

NO.	Nama	Jabatan
1.	Rocky Rossy, S.Pd.I	Kepala Desa
2.	Khairul Salim, S.Sos	Sekretaris Desa
3.	Katmini, S.P	Kaur Umum & TU
4.	Ilham Rasyd, S.T	Ketua POKDARWIS
5.	Darlis	Panitia Hari Besar Islam
6.	Anton	Pemuda setempat
7.	Rel Fadri	Pengurus RW.008
8.	Agus Hidayat	Masyarakat setempat
TOTAL		8

Sumber : Data Olahan Penulis, 2024

H. Jenis Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan juga di catat untuk pertama kalinya. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan. Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua atau secara tidak langsung berbentuk hasil karya seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal-jurnal, media internet, dan dokumen Objek Wisata Bendungan Desa Sungai

Paku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2009) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2009) dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-

lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

J. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono : 2009) analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sekitar di kawasan objek wisata adalah membuka lapangan usaha, contohnya seperti membuka warung tempat makan dan ada yang menjadi petugas kebersihan, namun untuk jumlahnya masih tergolong kurang memadai jika banyaknya pengunjung yang datang. Ketika ada *event* yang berlangsung, biasanya dari *event* tersebut banyak meninggalkan sampah. Selain petugas kebersihan masyarakat sekitar juga saling memantu untuk membersihkan sampah tersebut. Selain keterlibatan masyarakat pada tujuan pembangunan tersebut, mereka juga membentuk lembaga lokal berupa Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Objek Wisata Alam

Bendungan Desa Sungai Paku sebagai pengelola khusus dalam melaksanakan program yang telah dirancang dan melakukan pengawasan terhadap pembangunannya. Lembaga ini memiliki fokus utama yaitu keterlibatan masyarakat kampung secara luas. Dengan arahan dari mereka, pergerakan pembangunan ini dimulai oleh masyarakat dengan bergotong royong membersihkan area sekitar bendungan, aktif memberikan aspirasi untuk keberlangsungan objek wisata ini kedepannya. Serta pihak POKDARWIS juga turut melakukan pemeliharaan rutin sesuai sumber daya yang ada. Masyarakat juga turut memberikan laporan apabila menemukan adanya kerusakan atau penyalahgunaan sumber daya yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat masyarakat sudah terlibat cukup aktif dan baik, namun sayangnya yang menghambat optimalnya indikator ini pada pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku yaitu kurangnya respon dari pemerintah desa terkait hal yang menyangkut proses inovasi yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Terkait

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam mencapai pembangunan pariwisata. Keterlibatan segenap pemangku terkait berupa keterlibatan dari pemerintah, pengusaha atau swasta dan masyarakat sekitar serta segala aspek yang berkaitan dalam rangka pembangunan kepariwisataan.

Selain dari pemerintah itu, swasta juga menjadi salah satu yang berperan dalam rangka menopang keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membangun berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Dimana sejauh ini, pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku adalah perusahaan yang tujuannya adalah mendukung dengan membutuhkan

feedback terhadap perusahaannya. Kontribusi yang ada seperti dalam bentuk sponsor, pembangunan fasilitas seperti *tracking*, gazebo dan lainnya. Pemerintah dan swasta belum terlibat aktif dan produktif dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku dalam bentuk bentuk pendanaan, pembangunan fasilitas, monitoring dan evaluasi program. Belum efektifnya adanya komunikasi secara internal maupun eksternal antar para pemangku kepentingan baik itu dari pemerintah desa sendiri dan dinas terkait.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Kemitraan atau *partnership* dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama dengan masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas untuk masyarakat setempat. Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Desa Sungai Paku didominasi oleh masyarakat sebesar 63%, pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah sebesar 29%, dan pihak swasta sebagai investor dalam mengembangkan objek wisata sebesar 8%.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Salah satu pemenuhan prinsip ini yang cukup baik berupa ditetapkannya pemeliharaan rutin yang dapat memelihara berbagai sumber daya alam yang ada disana .Sedangkan prinsip yang belum terpenuhi secara optimal adalah prinsip kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung pada kriteria keselamatan pengunjung dan sumber daya yaitu pada daya tarik minat pengunjung.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan wiata di Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku dilakukan

dengan menampung aspirasi masyarakat setempat. Ketika akan diadakan monitoring dan evaluasi masyarakat sekitar lingkungan wisata dikumpulkan untuk kemudian diberikan pengarahan dan dimintai pendapat. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata agar terciptanya kondisi yang harmonis antara wisatawan, kawasan wisata, dan masyarakat lokal maka perlu adanya upaya mewadahi aspirasi masyarakat terkait dengan lingkungan pariwisata yang mereka harapkan. Adapun yang menunjukkan indikator ini cukup berjalan dengan baik dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku berupa diadakannya kegiatan rutin Musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan pandangan dan gagasannya serta menuliskan isu-isu yang ada di sekitar desa, yang kemudian disepakati beberapa isu yang prioritas untuk ditangani lebih lanjut dengan pertimbangannya ke dalam perwujudan yang ada. Hingga kini upaya menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan wisata terus berlanjut.

6. Daya Dukung Lingkungan

Secara daya dukung ekonomi hal ini telah optimal dilihat dari adanya manfaat yang diberikan pada masyarakat lokal dan unsur biaya pada produk wisata yang ada sendiri telah sesuai dengan kualitas pengalaman wisata yang ditawarkan. Daya dukung sosial budaya telah cukup baik, terdapat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, adapun kehadiran wisatawan yang beragam tidak membawa dampak buruk bagi sosial budaya masyarakat, dan keramah-tamahan masyarakat sangat

mendukung pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku. Adapun prasarana sendiri masih kurang tercukupi terkait dengan ketersediaan fasilitas transportasi dan utilitas seperti toilet umum. permasalahan yang menghambat optimalnya indikator ini adalah tidak adanya fasilitas transportasi dari jalan umum hingga pusat wisata, fasilitas pembuangan sampah masih belum cukup jumlahnya, permasalahan ini juga berkaitan dengan tidak adanya daya dukung prasarana yaitu ketersediaan anggaran utilitas. Permasalahan lain yaitu di bidang sosial budaya, tidak adanya kesenian, kerajinan, dan penampilan budaya.

7. Monitor dan Evaluasi Program

Penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik kawasan wisata, dimana instrument penilaian tersebut memuat atraksi, amenitas, aksesibilitas. Masyarakat sendiri sebagai penduduk lokal terlibat dalam hal ini secara lebih umum yaitu pengawasan di area Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku memastikan tidak ada lagi perusakan fasilitas yang tersedia di area objek wisata. Masyarakat pun berdiskusi lebih lanjut terkait dengan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan atau permasalahan yang masih ditemukan ketika evaluasi tersebut. Sedangkan monitoring yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Paku sendiri berupa pembinaan. Diawali dengan melakukan pengawasan di kawasan wisata, melihat apa yang masih menjadi kekurangan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan terkait bagaimana mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan yang ada. Terkait pengawasan berbasis lingkungan sendiri dilakukan oleh dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Mengenai Akuntabilitas Lingkungan Hidup, menurut Bambang Sunaryo (2013), berpendapat bahwa

perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan komponen lingkungan hidup yang saling berkaitan. Hal ini masih sudah sesuai dengan realita dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku Kegiatan seperti penghijauan, penanaman pohon sekitar bendungan, gotong royong, kegiatan pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya yang diadakan oleh masyarakat desa wisata ini menunjukkan bahwa masyarakat tersebut bertanggung jawab untuk memanfaatkan lingkungan yang ada agar tidak menimbulkan dampak buruk eksploitasi lingkungan hidup.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

POKDARWIS Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku sendiri telah ada beberapa pelatihan terkait dengan pariwisata, namun sayangnya baik itu dari pihak penyelenggara ataupun penerima tidak memiliki pencatatan terkait pelatihan yang telah terlaksana sehingga hanya bergantung pada ingatan saja, sehingga menurut penulis hal ini menghambat pengamatan perkembangan secara pasti. Adapun pelatihan tersebut telah memenuhi standar karena membawakan topik-topik yang relevan dengan pariwisata berkelanjutan yaitu berupa pelatihan *guide*, *hospitality*, sejarah dan kebudayaan, *printing*, *public speaking*, penyusunan paket wisata, serta tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Upaya promosi terkait Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini sendiri telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Paku dapat dilihat dalam beberapa sosial media milik Desa Sungai Paku. Berdasarkan pemaparan terkait prinsip diatas dapat dikatakan bahwa upaya promosi masih tergolong belum cukup baik dilakukan karena masih mengandalkan promosi dari pemerintah

setempat hal ini belum optimal akibat tidak lengkapnya informasi terkait destinasi wisata yang ada dan tidak ada pembaharuan terkait dengan informasi atau kegiatan wisata

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Good Governance Tourism* dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku menunjukkan hasil penelitian disimpulkan bahwa belum dapat diwujudkan secara optimal. Hal ini dikarenakan dari 10 indikator hanya 3 indikator yang mampu dilaksanakan, antara lain :

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat Terkait. Dalam penerapan prinsip ini sudah cukup optimal dikarenakan penulis menilai adanya partisipasi masyarakat sudah dimulai sejak Bendungan ini diusulkan menjadi tempat wisata perencanaan, program, pelaksanaan, hingga keikutsertaan mengawasi aktivitas pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku yang menghambat optimalnya indikator ini hanya pada kurangnya respon dari pemerintah desa terkait hal yang menyangkut aspirasi inovasi yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Prinsip Keterlibatan segenap pemangku terkait. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa penerapannya belum optimal, melihat keaktifan pemangku kepentingan belum sepenuhnya terwujud. Prinsip tersebut terhambat terkait minimnya kontribusi pemerintah lokal, rendahnya komunikasi Pemerintah Desa Sungai Paku dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Walaupun sudah didirikannya POKDARWIS namun, keberadaan pelaku wisata diatasnya berperan penting karena

hambatan dalam pengelolaan ini melibatkan 2 instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar dan Dinas Pariwisata.

3. Prinsip Kemitraan Kepemilikan Lokal Pada Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku dalam penerapannya masih belum optimal, secara keseluruhan area Bendungan merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum sehingga menyebabkan sangat sulit untuk melakukan perizinan terkait pengelolaan Bendungan menjadi tempat wisata. Minimnya keberadaan dari kemitraan tersebut sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Secara garis besar kemitraan hanya berupa UMKM yang dikelola oleh masyarakat yang berada di area bendungan.
4. Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut. Prinsip ini juga masih belum bisa dikatakan terpenuhi secara optimal dikarenakan masih banyak hambatan yang dihadapi lebih terkait dengan masalah internal sumber daya manusia organisasi kampung wisata, terkait keterbatasan modal yang dimiliki oleh Desa Sungai Paku sendiri, dan terkait pemanfaatan sumber daya yang masih belum dipetakan.
5. Prinsip Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut maka ketercapaian prinsip ini dapat dinilai dari ada atau tidaknya upaya menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sesuai prinsip tersebut, dalam pengelolaan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai paku sudah terdapat upaya guna menampung, dan menyalurkan aspirasi tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 2 aktor yakni, dari POKDARWIS

- dan juga Pemerintah Desa Sungai Paku. Namun, apirasi itu juga masih terhenti pada Pemerintah Desa belum sepenuhnya tersalurkan ke dinas terkait.
6. Prinsip Daya Dukung Lingkungan. Adapun prasarana sendiri masih kurang tercukupi terkait dengan ketersediaan fasilitas transportasi dan utilitas seperti toilet umum. permasalahan yang menghambat optimalnya indikator ini adalah tidak adanya fasilitas transportasi dari jalan umum hingga pusat wisata, fasilitas pembuangan sampah masih belum cukup jumlahnya, permasalahan ini juga berkaitan dengan tidak adanya daya dukung prasarana yaitu ketersediaan anggaran utilitas. Permasalahan lain yaitu di bidang sosial budaya, tidak adanya kesenian, kerajinan, dan penampilan budaya.
 7. Prinsip Monitor dan Evaluasi Program. Monitoring yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Paku sendiri berupa pembinaan. Diawali dengan melakukan pengawasan di kawasan wisata, melihat apa yang masih menjadi kekurangan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan terkait bagaimana mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan yang ada. Terkait pengawasan berbasis lingkungan sendiri dilakukan oleh dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum.
 8. Prinsip Akuntabilitas Lingkungan. Mekanisme pertanggungjawabannya sendiri belum sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya dikarenakan tidak adanya peran akuntansi berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang ada. Sehingga sejauh ini akuntabilitas lingkungan yang ada hanya berupa manfaat yang dirasakan masyarakat secara nyata sesuai indikator GGT.
 9. Prinsip Pelatihan Pada Masyarakat Terkait. Adapun pelatihan tersebut telah memenuhi standar karena membawakan topik-topik yang relevan dengan pariwisata berkelanjutan yaitu berupa pelatihan *guide*, *hospitality*, sejarah dan kebudayaan, *printing*, *public speaking*, penyusunan paket wisata oleh POKDARWIS, serta tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata.
 10. Prinsip Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan penerapannya Berdasarkan pemaparan terkait prinsip diatas dapat dikatakan bahwa upaya promosi masih tergolong belum cukup baik dilakukan karena media promosi masih mengandalkan promosi dari pemerintah setempat dan juga media sosial ataupun berita terkait dari Desa Sungai Paku sendiri dan terbatasnya kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya melakukan promosi bersama.

B. Saran

1. Peningkatan bentuk komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi sendiri merupakan kunci utama untuk dapat melaksanakan fungsi masing-masing lembaga, mengefisienkan dan mengefektifkan program yang akan dilaksanakan, dan tentunya untuk mencapai tujuan bersama.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu menyusun pedoman atau indikator yang lebih terperinci dan mengikat, serta menyusun program pendidikan atau pelatihan yang lebih terfokus dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dapat dilakukan rapat atau diskusi antar bidang Destinasi Pariwisata dan bidang Pemasaran

- dan Kerjasama dengan pihak swasta untuk ikut serta bekerjasama dalam pembangunan pariwisata yang ada. Sehingga, seluruh komponen dari lembaga mengetahui bentuk kerjasama yang ada dan dapat saling mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Kemitraan dengan pihak swasta perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas.
 4. Membuat, melengkapi, dan memperbaharui pencatatan baik itu terkait sumber daya pariwisata yang dimiliki berupa dokumen daftar aset baik itu sumber daya alam, budaya, minat khusus, dan modal guna mengetahui apa saja yang perlu dimanfaatkan, dilindungi, dan diperbaiki. Pencatatan lainnya berupa daftar pelatihan yang dilakukan atau pun diterima guna mengukur pencapaian masing-masing lembaga dan memantau.
 5. Pemerintah Kabupaten sebaiknya memasukkan Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku sebagai salah satu objek wisata yang ada di Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar, guna anggaran yang ada dapat bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan dapat dianggarkan untuk pengelolaan Objek Wisata ini tidak hanya bersumber dari Anggaran Dana Desa.
 6. Perlu dijadikannya Objek Wisata Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini sebagai Objek Wisata Prioritas, sehingga pengelolaan pun dapat difokuskan dan diutamakan guna meningkatkan kualitas pembangunan objek wisata yang ada di Desa Sungai Paku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arida, I. N. S. (2016). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*.
 Widodo, J. (2001). *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Intan Cendekia
 Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*

Jurnal, Skripsi, dan Media Online

- Ariana, R. (2016). *Good Tourism Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lubuk Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2020*. 9, 1–23.
 Dafa Rizky Prayoga, Dini, A. Z., Tarigan, L. A., Sari, P. A., Lubis, D. P., & Permana, S. (2022). Analysis of Concept 3a in Tourism Development (Case Study: Dusun Iv, Desa Denai Lama, Kab. Deli Serdang). *Jurnal Samudra Geografi*, 5(2), 114–126. <https://doi.org/10.33059/jsg.v5i2.5545>
 Desmayeti, Junriana, & Aprita, D. (2021). Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(1), 645–653.
 Hidayat, I. K., & Rahayu, S. (2017). *Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Di Kawasan Kotagede Kota Yogyakarta*. 545–561.
 Hidayati, N. (2018). Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar Di Kabupaten Boyolali Dalam Perspektif Good Tourism Governance. In *Skripsi Administrasi Publik*.
 Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan

- Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>
- Khairuzzaman, M. Q. (2016). *Studi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*. 4(1), 64–75.
- Pradana, G. W., Rahman, A., & Haryono, H. (2021). Tourism Village Management Requires Good Tourism Governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta area. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 20–27.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>
- Rahadiarta, I. G. N. P. S., Wiranatha, A. S., & Sunarta, I. N. (2021). Penerapan Empat Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7, 46.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p03>
- Ramadhani, N. D. P., Rini, & Setiawan, H. (2021). Pengaruh 3A Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Pada Objek Wisata Air Terjun Temam. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 162–171.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. *Alfabeta Bandung*, 148.
- Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. (2023). *Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau*. 14(2).